

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
NGGANCAR DI DESA GEMBONG KECAMATAN GEMBONG
KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum



Oleh:

MUHAMMAD TASIRUL WAFA

132311042

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hanka Kangas III Ngaliyan, Telp./Fax: 7601291, 7624991 Semarang 50185

LEMBAR PERSETUJUAN

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n Sdr. Muhammad Tasirul Wafa.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami
kirirkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Tasirul Wafa
NIM : 132311042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek
Ngguncar Di Desa Gembong Kecamatan
Gembong Kabupaten Pati"**.

Dengan ini kami memohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat
segera dimunafasikan.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Tolkah, S. Ag, M.A.
NIP.19690507 199603 1005

Ridwan M. Ag.
NIP.19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kandang III Ngaliyas, Telp./Fax. 7661291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Tasirul Wafa
NIM : 132311042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
NGGANCAR DI DESA GEMBONG KECAMATAN GEMBONG
KABUPATEN PATI"

Telah disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang, pada tanggal :

11 Juli 2018

Dua dapat diterima sebagai kelengkapan dalam rangka menyelesaikan program
Sarjana Satriata I guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Semarang, 11 Juli 2018
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Rokhmah, M.Ag.

NIP.19660518 199403 1002

Supriyati, M.Ag.

NIP.19710402 200501 1 004

Penguji Utama I

Pengaji Utama II

Dr. H. Abdul Ghofor, M.Ag.

NIP.19670117 199703 1001

Amir, Laila, M.Ag.

NIP.19720404202003121002

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Tofiq, S.Ag, M.A.

NIP.19690507 199603 1005

Supriyati, M.Ag.

NIP.19710402 200501 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْطَّلِيلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَرِيمًا ٢٩

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.
(QS. An-Nisaa’: 29)*

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Rahmat dan Taufik Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis tercinta, Bapak Waji, dan Ibu Jarmi.
2. Kepada kakak-kakak penulis serta semua keluarga penulis yang telah memberikan biaya, pikiran, tenaga, bahkan dukungan dan do'a.
3. Seluruh warga Teater Asa.
4. Seluruh teman-teman penulis, penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segi apapun.

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, bila dikemudian hari ditemukan bukti-bukti pelanggaran, maka saya siap bertanggungjawab dan menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang, 2 Juli 2018



Muhammad Tasirul Wafa

132311042

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)nya*

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Desa Gembong merupakan salah satu desa yang mempunyai hasil pertanian cukup besar. Sebagian dari penduduk desa gembong bermata pencaharian sebagai petani. Rata-rata warga gembong menanam ketela dikebun mereka. Proses pemanenan ketela, baik dilakukan pemilik kebun maupun yang ditebasakan, masih meninggalkan sisa-sisa ketela di dalam tanah. Sisa-sisa ketela tersebut yang oleh masyarakat sekitar (bukan pemilik kebun maupun penebas) masih dapat dimanfaatkan. Oleh karenanya, masyarakat mengambil sisa-sisa tersebut, praktek ini oleh masyarakat disebut dengan *nggancar*. Praktek *nggancar* di Desa Gembong merupakan kegiatan mencari sisa ketela yang tertinggal di dalam tanah, yaitu ketela yang sudah tidak diperlukan lagi oleh penebas maupun pemilik kebun setelah dipanen. kegiatan *nggancar* ini dilakukan ketika musim panen ketela tiba.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama Bagaimanakah praktek *nggancar* ketela di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati?, dan Kedua Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek *nggancar* ketela di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif normatif, yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek *nggancar* yang dilakukan oleh warga Desa gembong merupakan kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh warga Desa Gembong saat musim panen ketela. Praktek ini sudah berjalan bertahun-tahun, masyarakat biasa melakukan kegiatan *nggancar* walaupun mereka tidak tahu siapa

pemilik lahan atau yang mempunyai hak milik teradap hasil panen tersebut. Kegiatan *nggancar* di desa Gembong dibagi menjadi *duanggancar* yang baik dan *nggancar* yang menyimpang. Praktek *nggancar* menurut hukum Islam diperbolehkan, sebab ketela tersebut masuk kedalam kategori benda *Ihraz al-mubahat*, yaitu benda-benda yang boleh dimiliki. Ketela tersebut merupakan sisa-sisa yang sudah tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dan secara otomatis menjadi benda mubah, sisa tersebut juga belum dikuasai oleh orang lain dan *penggancar* mempunyai tujuan untuk memiliki hasil *gancaran* tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat untuk semua keluarga, sahabat, semua makhluk dimuka bumi dan sebagai ummatnya semoga kelak mendapat pertolongan di hari akhir nanti. Amin

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, berkat kesabaran, kerja keras, dan kesungguhan hati serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung sehingga penulis mempunyai semangat tinggi untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh Karen itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak.

Terkhusus kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Muamalah serta Supangat, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan, atas

kebijaksanaan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

4. Bapak Tolkah, M.A. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Supangat, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga dan pemikirannya guna mendampingi dan menjadi teman diskusi untuk penulis.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak berbagi serta memberikan ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis yang telah banyak memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memberikan fasilitas dan memenuhi keinginan penulis. Tanpa semangat dan do'a mereka mungkin penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kakak penulis yang telah memberikan dorongan semangat untuk lebih maju.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu secara moril maupun materiil.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih dan do'a. Semoga jasa dan kebaikan semua pihak tersebut dicatat oleh Allah SWT sehingga kelak mendapatkan tempat yang paling baik di sisi-Nya.

Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Robbal'Alamin.

Semarang, 2 Juli 2018

Muhammad Tasirul Wafa
132311042

DAFTAR ISI

COVER

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM.....	21
A. Pengertian Kepemilikan Dalam Islam	21
B. Dasar Hukum Kepemilikan	25
C. Sebab-Sebab Kepemilikan	27
D. Jenis-Jenis kepemilikan.....	36
E. Hikmah kepemilikan	41

F. Hukum Syara’	42
BAB III PRAKTEK NGGANCAR KETELA DI DESA	
GEMBONG KECAMATAN GEMBONG	
KABUPATEN PATI	46
A. Gambaran umum Desa Gembong Kecamatan	
Gembong Kabupaten Pati	46
B. Proses Penanaman Ketela Sampai Panen	58
C. Praktek <i>Nggancar</i> Ketela di Desa Gembong	66
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP	
PRAKTEK NGGANCAR DI DESA	
GEMBONG KECAMATAN GEMBONG	
KABUPATEN PATI	72
A. Analisis pelaksanaan <i>nggancar</i> di Desa	
Gembong Kecamatan Gembong kabupaten	
Pati	72
B. Analisis Hukum Islam terhadap praktek	
<i>nggancar</i> di Desa Gembong Kecamatan	
Gembong kabupaten Pati	75
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84
C. Penutup	84
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa. Seseorang hanya ahli dalam bidang tertentu saja. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain. Maka, timbullah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.¹

Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara', dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah suatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat.

Secara bahasa, kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 31.

terhadapnya. Menurut istilah ulama Fiqh, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syara'.²

Dilihat dari unsur harta (benda dan manfaat), kepemilikan dapat dibedakan menjadi *milk at-tamm* dan *milk an-naqish*. *Milk at-tamm* adalah kepemilikan terhadap harta benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas kepemilikan ini tidak bisa di gugurkan kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh syara', seperti jual beli, mekanisme hukum waris ataupun wasiat. Sedangkan *milk an-naqish* (kepemilikan tidak sempurna) adalah kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya, atau pemilikan atas benda tanpa di sertain pemilikan atasmanfaatnya.³

Sebab-sebab kepemilikan yang diakui oleh syariah terdapat 4 hal:

Ihraz al-Mubahat, cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum di kuasai atau di miliki pihak lain. *Al-Uquud*, pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. *Al-Khala'fiyyah*, penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. *Al-Tawallud minal Mamluk*, sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya, setiap peranakan atau segala

²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

³*Ibid*, hlm. 36

sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya.⁴

Dalam Islam mencari rejeki adalah bebas dan tidak ada batas jumlah yang diperoleh, bahkan kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam dalam mengambil pilihan hingga pilihan yang salah sekalipun atau pilihan yang benar untuk kebaikan manusia sendiri, sebagaimana disebutkan dalam (Q.S SuratYunus 10;108)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِكَلِيلٍ ١٠٨

Artinya: Katakanlah: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al Quran) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. (Q.S SuratYunus 10;108)⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa anugerah Allah bergantung pada pilihan awal manusia terhadap yang benar, karena Allah tidak akan merubah kaum Kecuali mereka sendiri mau merubahnya (Q.S. Ar- Rad 13;11)

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مَّبِينَاتٌ يَسُدُّنَهَا وَنَاكِاتٌ يُلْفِئْنَ رُءُوسَهُنَّ وَأَنزَالُ السُّجُودِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَعْنَابِ ۖ وَإِذَا نَادَىٰ رَبُّكَ لِلْعِبَادِ أَوَدَّبَ الْجَحَلُّ ۚ وَإِذَا يُدْعَىٰ النَّاسُ فَيَكُونُ أَعْتَقًا ۚ وَتَوَلَّىٰ زُرَّارًا يَلْعَنُونَ ۚ وَإِذَا نَادَىٰ رَبُّكَ لِلْعِبَادِ أَوَدَّبَ الْجَحَلُّ ۚ وَإِذَا يُدْعَىٰ النَّاسُ فَيَكُونُ أَعْتَقًا ۚ وَتَوَلَّىٰ زُرَّارًا يَلْعَنُونَ ۚ

⁴Ibid, hlm. 46.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 296

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar- Rad 13;11)⁶

Di dalam hukum muamalah, Islam banyak mengakui hukum-hukum sebelumnya, karena materi hukum tersebut sesuai dengan hajat kehidupan umat manusia, misalnya: Akad gadai, jual beli, sewa menyewa, mudhorobah (bagi hasil) dan lain-lain, tetapi perlu di tegaskan bahwa ketika transaksi-transaksi tersebut menyebabkan ketidak adilan, kerugian, dan kesengsaraan terhadap manusia, maka secara tegas hukum Islam melarangnya, misalnya: jual beli minuman keras, berjudi, memakan riba dan sejenisnya. Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsipnya diatas pijakan nilai-nilai Ilahiyah (ketuhanan) dan moralitas serta berwatak sosial. Konsekuensi dari prinsip ini dapat di lihat ketika para fuqaha membentuk kaedah-kaedah hukum seperti: *المُسْقَنة تَجْلِبُ التَّيسِيرَ* (kesulitan menghendaki adanya kemudahan), *تغليباً لمصلحة العامة على المصلحة الخاصة* (Cenderung mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan khusus). *نفى الضرر والخرج* (menghilangkan bahaya dan kesulitan).

⁶Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Lembaga Sosial dan Agama, 2012), hlm.9.

Kaidah diatas menjadi prinsip dasar adanya hukum keharusan menjaga dan memelihara hak-hak tetangga, sehingga seseorang dalam menggunakan haknya, tidak boleh membahayakan atau menyebabkan memelaratkan tetangganya.⁷

Seseorang melakukan banyak cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam meningkatkan taraf hidup, apalagi dimasa sulit yang kebanyakan masyarakat mengandalkan hasil ternak dan pertanian, jika masyarakat tidak bisa mensiasati masalah perekonomian keluarga maka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam mencari nafkah masyarakat terkadang tidak bisa membedakan antara boleh, tidak boleh, dan tradisi. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi kegenerasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.⁸

Masyarakat Jawa sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan

⁷*Ibid*, hlm. 27.

⁸Marzuki, "Jurnal Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Islam", (<http://eprints.uny.ac.id>), hlm. 1

ajaran-ajaran Islam. Memang ada beberapa tradisi dan budaya Jawa yang dapat diadaptasi dan terus dipegangi tanpa harus berlawanan dengan ajaran Islam, tetapi banyak juga budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti tradisi masyarakat memungut sisa panen ketela yang telah diborongtanpaseizin penebas. Masyarakat Jawa yang memegang ajaran Islam dengan kuat (*kaffah*) tentunya dapat memilih dan memilah mana budaya Jawa yang masih dapat dipertahankan tanpa harus bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara masyarakat Jawa yang tidak memiliki pemahaman agama Islam yang cukup, lebih banyak menjaga warisan leluhur mereka itu dan mempraktekannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, meskipun bertentangan dengan ajaran agama yang mereka ikuti. Fenomena seperti ini terus berjalan hingga sekarang.⁹

Mengumpulkanketeladarisisa panen biasa disebut oleh masyarakat Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dengan istilah *Nggancar* atau biasa disebut dengan Ngasak. Dalam kamus lengkap bahasa Jawa, ngasak mempunyai arti mencari, mau mengambil menjadi hak milik.¹⁰ Dalam hal ini masyarakat mencari, mengambil barang yang sudah dibuang atau tidak diperlukan lagi oleh orang lain untuk dijadikan hak milik.

Kegiatan *nggancar* sendiri biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Gembong pada musim panen ketela. Semula

⁹*Ibid*, hlm. 2

¹⁰ Sudarmanto, *Kamus lengkap Bahasa Jawa*, (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm. 206.

masyarakat hanya *nggancar* ketela yang masih tertinggal di dalam tanah saja, dan dilakukan ketika proses panen selesai. Akan tetapi, karena sudah menjadi kebiasaan maka *nggancar* biasanya bukan cuma mengambil sisa dari panen yang masih tertinggal di dalam tanah saja, mereka tidak menunggu proses panen selesai dan tanpa meminta izin dari penebas. Praktek ini jika di pandang dalam segi fiqih maka dalam syarat *milk at-tamm* belum terpenuhi dan bertentangan dengan hukum Islam yang tidak memperbolehkan mengambil barang milik orang sebagaimana disebutkan dalam (Q.S Al-Baqarah ayat 188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ مِمَّا بَطِلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّمَّا مَوَّلَ النَّاسِ لِتَتَعَلَّمُوا ۚ ۱۸۸

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (al Baqarah/2 : 188).¹¹

Masyarakat Desa Gembong dalam melakukan kegiatan *nggancar*, kurang memperhatikan beberapa hal yang bersangkutan dengan kegiatan *nggancar*. Pertama masyarakat tidak tahu apakah masih dibutuhkan atau tidak ketela yang diambil. Kedua masyarakat *nggancar* ketela tanpa seizin penebas.

¹¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 36.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah praktek *nggancar* ketela di Desa Gembong Kec. Gembong Kab. Pati?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek *nggancar* ketela di Desa Gembong Kec. Gembong Kab. Pati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui praktek *nggancar* ketela di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek *nggancar* ketela di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti
Dapat dijadikan salah satu sarana peneliti untuk dapat mengetahui kepastian hukum Islam tentang praktek *nggancar* ketela yang telah ada di masyarakat Desa Gembong.
2. Bagi peneliti yang lain
Penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan (*referensi*) untuk penelitian yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan kepemilikan memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini peneliti mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Dari penelusuran peneliti, penelitian yang sudah ada yaitu :

Pertama, skripsi ini disusun oleh M. Yazid Farihin Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”, pada skripsi ini menerangkan tentang permasalahan pro dan kontra terhadap status kepemilikan dedak hasil selepan padi sebagai milik dari pemilik selepan padi dan sebagai milik dari pemilik padi. Akan tetapi pemilik padi dan pemilik selepan padi sudah sama-sama tahu, jika menyelepan padi maka dedak menjadi pemilik gilingan padi. Pada prinsipnya dedak sudah menjadi bagian dalam akad meskipun dalam *ijab qobul* tidak menyebutkan secara spesifik bahwa dedak menjadi milik pemilik gilingan padi.¹²

¹²M. Yazid Farihin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”. Skripsi, Syariah, Semarang: Perpustakaan Syariah UIN Walisongo. 2015

Kedua, skripsi ini disusun oleh Abdul Wahhab Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngasak*”, pada skripsi ini menerangkan tentang pengambilan daun tembakau kering yang dianggap tidak dibutuhkan lagi oleh si pemilik sawah. Hal ini sesuai dengan teori milkiyah pada fiqh muamalah karena salah satu sebab kepemilikan barang yang belum dimiliki orang lain. Daun tembakau yang di ambil belum menjadi milik orang lain dan pemilik sawahpun sudah tidak membutuhkan daun tembakau yang kering tersebut.¹³

Ketiga:skripsi Nur Chafidoh yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status kepemilikan Tanah SMK Muhammadiyah 1 Semarang skripsi ini membahas status kepemilikan tanah SMK Muhammadiyah 1 Semarang yang pada dasarnya berasal dari tanah wakaf Bapak Abdul Karim Suryodiputro yang diwakafkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah. Tanah wakaf tersebut sudah sah menurut pandangan Diniyah, karena wakaf tersebut sudah sesuai dengan rukun-rukun wakaf dan syarat-syarat wakaf, akan tetapi belum disertifikatkan sebagai tanah wakaf melainkan hanya disebutkan sebagai tanah yang berstatus hak milik atas tanah. Hal ini sudah sesuai dengan teori milkiyah dalam Fiqih muamalah di mana salah satu sebab-sebab milkiyah yaitu karena aqad, dan aqad yang

¹³ Abdul Wahab “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngasak*”. Skripsi, Syariah, Semarang: Perpustakaan Syariah UIN Walisongo. 2015

dilakukan untuk memperoleh tanah SMK Muhammadiyah I Semarang adalah melalui proses wakaf.¹⁴

Keempat: skripsinya Tuti Ernawati yang berjudul "Studi Komparatif Konsep Kepemilikan Harta dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Islam", Pada skripsi tersebut menekankan pada beberapa permasalahan yaitu bagaimana sistem ekonomi kapitalis memandang hak milik mutlak dan bagaimana pula Sistem Ekonomi Islam memandangnya.¹⁵

Kelima: skripsi Sri Yanti yang berjudul Analisis Terhadap Status Kepemilikan Aset-Aset di Madrasah Aliyah Ash-Shiddiqiyyah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon skripsi ini membahas status kepemilikan aset-aset di Madrasah Aliyah Ash-Shiddiqiyyah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang merupakan *milk al-tam*, yang dimiliki oleh Yayasan An-Nasher dengan ditandatangani atas nama KH. Nasiruddin Shiddiq, karena melalui *al-'aqad ba'i*. Walaupun perjanjian jual beli tanah di atas materai sudah dinyatakan hilang, namun akta notaris sebagai bukti status kepemilikan aset-aset

¹⁴Nur Chafidoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status kepemilikan Tanah SMK Muhammadiyah 1 Semarang*, Skripsi Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah UIN Walisongo, 2007.

¹⁵Ermawati Tuti "Studi Komparatif Konsep Kepemilikan Harta dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Islam" Skripsi, Syariah, Semarang: Perpustakaan Syariah UIN Walisongo. 2004

di Madrasah Aliyah Ash-Shiddiqiyah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon sudah kuat statusnya dalam hukum Negara.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, sebab metode merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat atau medan yang terjadi permasalahan.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti meneliti praktek *nggancar* di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari *kuantifikasi* (pengukuran). Penelitian ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku juga tentang

¹⁶ Sri Yanti, *Analisis Terhadap Status Kepemilikan Aset-Aset di Madrasah Aliyah AshShiddiqiyah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon*, Skripsi Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah UIN Walisongo, 2006.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm, 15.

fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif normatif, dimana peneliti ini memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan.

Peneliti berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa gambar dan kata-kata tertulis dari informan menggunakan bahasa daerah yang kemudian penulis tafsirkan dengan bahasa Indonesia sesuai kasus yang diamati. Deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.¹⁹

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.²⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu:

¹⁸ Anselm, Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 11.

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh jilid I*. (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm, 16.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.²¹ Data primer ini peneliti dapatkan melalui:

- 1) Hasil wawancara langsung dengan para petani ketela, di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
- 2) Hasil wawancara langsung dengan orang yang *nggancar* di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
- 3) Hasil wawancara langsung dengan penebas singkong di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.
- 4) Hasil wawancara langsung dengan Kepala Desa Gembong.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis data yang dijadikan sebagai pendukung data, pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²² Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapinya sumber data primer adalah berupa buku, jurnal, majalah, pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

²¹ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2008, hlm. 103.

²² Suradi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 1998), hlm.85.

4. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data. Hal ini karena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data yang terjadi pada fenomena yang terjadi di masyarakat tentang jual beli singkong. Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti di wilayah Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Cara-cara untuk memperoleh data dari fenomena lapangan tersebut digunakan beberapa praktis juga, metode tersebut antara lain:

- a. Observasi (*observation*) merupakan suatu pengamatan yang komplek, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Dengan maksud untuk menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.
- b. Dokumentasi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²³ Dalam skripsi ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara dokumentasi berupa data monografi desa dan catatan-catatan transaksi yang penulis bisa lihat dan temukan di lokasi.

²³ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*, hlm. 274.

- c. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pelaku.²⁴ Metode ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai praktek *nggancar* yang dilakukan oleh seseorang yang terlibat dalam praktek tersebut. Ada tiga jenis pembagian wawancara yang dikemukakan oleh Patton sebagai berikut:

1) Wawancara pembicaraan informal

Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja. Sewaktu pembicaraan berjalan, terwawancara malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai.

2) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara

Wawancara jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan, supaya yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Tidak ada perangkat pertanyaan baku yang dipersiapkan terlebih dahulu. Pelaksanaan wawancara dan

²⁴*Ibid*, hlm. 107.

pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya.

3) Wawancara baku terbuka

Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannyapun sama untuk setiap responden. Keluwesan mengadakan pertanyaan pendalamanterbatas, dan hal itu bergantung pada situasi wawancara dan kecakapan wawancara. Wawancara demikian digunakan untuk mengurangi variasi yang bisa terjadi antara seorang terwawancara dengan yang lainnya. Wawancara jenis ini bermanfaat pula dilakukan apabila pewawancara ada beberapa orang dan terwawancara cukup banyak jumlahnya.²⁵

Dalam skripsi ini penulis memilih wawancara dengan jenis wawancara yang ke Dua yaitu pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, karena lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan penulis. Sebab kurang tepat jika menggunakan jenis wawancara yang Pertama, karena adanya indikasi tidak terbuka dan terwawancara malah barangkali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai. Serta kurang tepat jika menggunakan jenis wawancara yang ke Tiga yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku dan keluwesan mengadakan pertanyaan pendalaman terbatas.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187-188

Dalam memberi seperangkat pertanyaan kepada responden penulis menggunakan jenis sampel purposif (*purposif sampling*). Sampling purposif adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.²⁶ Dalam skripsi ini sampel sumber datanya adalah orang yang ahli dalam bidang pertanian ketela, pembeli dan penebas ketela di Desa Gembong.

Adapun narasumber terdiri dari 17 Orang, 8 narasumber dari petani, 3 narasumber dari penebas, 6 nara sumber dari *penggancar*. Penulis mewawancarai hanya 8 Orang petani karena pertimbangan tertentu dengan mengambil sampel orang yang ahli dalam bidang pertanian, mewawancarai 3 narasumber dari penebas karena mengambil sampel yang paling sering menebas secara besar-besaran hanya ada 3 penebas saja, 6 narasumber dari penggancar sebagai sampel untuk di minta informasinya.

5. Metode Analisis Data

Analisis dapat diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu

²⁶ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D, (Bandung: 2014, Cet. 21), hlm. 85.

kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya sehingga lebih mudah difahami.

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengelolaan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data *deskriptif*, yakni menganalisa mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.²⁷ Karena jenis penelitian ini kualitatif maka disebut dengan penelitian deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan bagaimana praktek pelaksanaan *nggancar* yang terjadi di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tersebut.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan menguraikan tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian. BAB II ini peneliti akan menguraikan tentang pengertian kepemilikan, macam-macam kepemilikan, dasar hukum syara', rukun dan syarat kepemilikan. BAB III menguraikan tentang hasil penelitian berupa, gambaran umum Desa Gembong, diantaranya profil desa, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, data pertanian ketela dan

²⁷ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.20.

petaninya. Kedua, proses penanaman ketela sampai masa panen. Ketiga, peneliti menguraikan urutan praktek *nggancar* di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. BAB IV berisi tentang analisis hukum Islam. Sehingga analisis menghasilkan, pertama, praktek *nggancar* ketela, kedua, analisis hukum Islam terhadap praktek *nggancar* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. BAB V penutup penulis akan menguraikan tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Kepemilikan Dalam Islam

Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang di tetapkan oleh syara', di mana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ada hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sautu yang di miliki manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat.¹

Secara bahasa kata *milkiyah* (الملكية) berasal dari kata *milk*. Atau *malakah* (ملكة) yang artinya milik.² kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut istilah ulama fiqih, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syara'.³

Kata menghalangi dari definisi diatas adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

² A. Thoha Husein al-Mujahid dan A. Atho'ilalah Fathoni Alkhalil, *Kamus Akbar Bahasa Arab*, (Depok: Gema Insani, 2013), hlm. 936.

³ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit*, hlm. 34.

terlebih dahulu dari pemiliknya. Sedangkan pengertian penghalang adalah sesuatu ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap harta miliknya.

Sedangkan an-Nabhani mendefinisikan pemilikan sebagai hukum *syara'* yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti disewa, maupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya, seperti di beli dari barang tersebut. Oleh karena itu kepemilikan adalah hukum *syara'* yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan tertentu.⁴

Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para *fuqaha*. Kamaluddin ibnu Al-Humam, yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich memberikan definisi sebagai berikut:

بِأَنَّهُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّصَرُّفِ إِبْتِدَاءً إِلَّا لِمَا نَعِ

*Artinya: Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan tasarruf sejak awal kecuali karena adanya penghalang.*⁵

Al-Maqdisi yang dikutip juga oleh Ahmad Wardi Muslich memberikan definisi sebagai berikut.

الْمِلْكُ بِأَنَّهُ الْإِخْتِصَاصُ الْحَاجِزُ

⁴ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003, cet. I), hlm. 98.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015, cet. 3), hlm. 69.

*Artinya: Hak milik itu adalah kekhususan yang menghalangi.*⁶

Maksud definisi tersebut adalah bahwa hak milik adalah penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalang orang lain untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarka oleh syara'.⁷

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan, yang dikutip oleh Hendi Suhendi sebagai berikut.

إِحْتِصَاصُ يُمْكِنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

*Artinya: Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.*⁸

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.

Berdasarkan definisi milik tersebut, kiranya dapat dibedakan antara hak dan milik, untuk lebih jelas dicontohkan sebagai berikut: seorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada di bawah ampuannya, pengampu punya hak untuk membelanjakan harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berada di bawah ampuannya.

⁶ *Ibid*, hlm. 69.

⁷ *Ibid*, hlm. 70.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 33.

Dengan kata lain dapat dikatakan tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki.⁹

Ketika seseorang telah memiliki harta benda dengan jalan yang dibenarkan syara', maka ia memiliki kewenangan khusus atasnya. Ia memiliki kekhususan untuk mengambil manfaat atau bertransaksi atasnya sepanjang tidak ada, halangan syara' yang mencegahnya, seperti gila, anak kecil dan lainnya. Keistimewaan itu juga bisa mencegah orang lain untuk memanfaatkan atau bertransaksi atas kepemilikan harta tersebut, kecuali terdapat aturan syara' yang membolehkannya, seperti adanya akad Wakālah.¹⁰

Pentasharufan seorang wali atau *washi* atau wakil terhadap harta tersebut tidaklah berlaku secara mendasar, akan tetapi dengan berdasarkan jalur pemandatan dan perwakilan yang ditetapkan oleh syara', sehingga anak kecil atau oran gila atau lain sebagainya adalah tetap sebagai pemilik harta tersebut, hanya saja ia dilarang melakukan pentasharufan terhadapnya dikarenakan status kelayakan dan kepututannya yang tidak sempurna atau karena kehilangan kelayakan dan kepututan tersebut, dan hak untuk melakukan pentasharufan terhadap harta tersebut bisa kembali lagi kepadanya ketika alasan atau

⁹ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit*, hlm. 35.

sebab yang menjadikan dirinya dilarang melakukan pentasharufan terhadap hartanya tersebut hilang.¹¹

Secara asal, harta benda boleh dimiliki. Namun, terdapat beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk memiliki harta tersebut. Seperti harta yang di khususkan untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat publik (fasilitas umum).¹²

B. Dasar Hukum Kepemilikan

Harta kekayaan sejatinya adalah milik Allah SWT manusia semuanya adalah para hamba-Nya da kehidupan didalamnya manusia bekerja, berkarya, dan membanunnya dengan menggunakan harta Allah SWT juga, karena semua itu adalah milik-Nya, maka sudah seharusnya harta kekayaan meskipun terikat dengan nama orang tertentu adalah untuk semua hamba Allah SWT dan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٩

Artinya: Dialah (Allah), yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju kelangit, lalu Dia

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili (ed.), *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk dari “Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu”, Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid VI, Cet. I, hlm. 450.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit*, hlm. 35.

menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 29)¹³

Berarti harta kekayaan memiliki fungsi sosial yang tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta kemaslahatan-kemaslahatannya. Jadi dengan begitu, kepemilikan individu di dalam pandangan Islam adalah merupakan sebuah fungsi sosial.

Wahbah Zuhaili menyebutkan, sesungguhnya Islam adalah sebuah manhaj atau sistem yang sudah jelas. Penggunaan ungkapan seperti ini yang diambil dari ajaran-ajaran komunisme atau sosial marxisme, bertentangan dengan kebebasan dasar manusia di dalam keinginan untuk memiliki, dan menyesatkan pikiran di dalam memahami hakekat pandangan Islam terhadap kepemilikan. Karena kepemilikan individu adalah sebuah hak yang dihormati dan dilindungi dalam Islam kecuali pada batasan-batasan hak individu lain dan kemaslahatan masyarakat umm. Maka oleh karena itu, hak kepemilikan bukanlah fungsi sosial yang menjadikan pemilik hanya sekedar sebagai pegawai untuk kepentingan kelompok, akan tetapi yang benar adalah bahwa hak kepemilikan memiliki fungsi sosial sebagaimana ia juga memiliki sifat individual. Penghapusan kepemilikan dinilai bertentangan dengan fitrah manusia, berenturan dengan emosi dan kecintaan manusia untuk memiliki serta dianggap

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PustakaAmani, 2005), hlm. 6.

sebagai sebab yang nyata di dalam pembungkaman dan peredupan berbagai energi dan potensi manusia, kecenderungan untuk berkarya dan keinginan diri untuk maju.¹⁴

Dengan katalain, sesungguhnya Islam tidak melarang kepemilikan individu secara mutlak, namun juga tidak membebaskan dan membiarkanya tanpa batas. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisā': 29)*¹⁵

Islam menetapkan hukuman atas tindakan pencurian, *ghosob* (penyerobotan), perampasan, penipuan, penarikan pajak secara zhalim dan sebagainya, juga menuntut denda ganti rugi atas pengrusakan harta orang lain.¹⁶

C. Sebab-Sebab Kepemilikan

Kepemilikan dalam Islam untuk memiliki harta, ternyata tidak semudah yang dipikirkan oleh manusia, harta dapat dimiliki oleh seseorang asal tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku,

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili (ed.), *Op.Cit*, hlm. 475.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm.107.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili (ed.), *Op.Cit*, hlm. 476.

baik hukum Islam maupun hukum adat. Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda.¹⁷ Sebab-sebab kepemilikan yang di akui oleh syariah terdapat 4 hal, yakni *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas), *al-Aqd* (kontrak), *al-Khalafiyyah* (penggantian), dan *at-Tawallud* (berkembang biak).¹⁸

1. *Ihraz al-Mubahat*

Ihraz al-mubahat Adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. *Al-Mubahat* adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani' asy-syar'iy*) untuk memilikinya. Penguasaan tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara yang lazim, misalnya dengan menempatkannya pada tempat yang dikuasainya atau dengan memberi batas atau tanda kepemilikan.

Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk tujuan dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta bebas ini untuk tujuan kepemilikan, dinamakan dengan istila'.

¹⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 35.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit*, hlm. 42.

Ada 4 cara penguasaan harta bebas, yakni:

a. *Ihya' al-Mawāt*

Ihya' al-Mawāt yaitu mengolah tanah yang gersang. *Al-mawāt* artinya tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan sama sekali serta berada di luar daerah. Maka, tanah tidak tergolong sebagai *al-mawaat* jika ia adalah milik seseorang, atau berada di dalam daerah atau di luar daerah tetapi menjadi bagian dari daerah tersebut.¹⁹

b. *Ishthiyad* (Berburu)

Ishthiyad secara bahasa, *Shaid* (berburu) adalah meletakkan tangan pada sesuatu yang mubah yang belum dimiliki siapapun. *Shaid* terjadi dengan cara penguasaan secara hukum yaitu dengan melakukan sesuatu yang membuat burung, hewan atau ikan tidak bisa lari, seperti membuat kolam untuk menangkap ikan, membuat jaringan, atau menggunakan hewan yang dilatih untuk berburu seperti anjing, harimau dan binatang-binatang berburu yang dilatih lainnya.

Berburu adalah halal bagi seseorang, kecuali apabila ia sedang ihram, haji, atau umrah, atau buruan itu berada di tanah Haram Mekah atau Madinah Munawwarah.²⁰ Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 96:

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili (ed), *Op.Cit*, hlm. 413.

²⁰ *Ibid*, hlm. 414.

أَحْلَلْ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٩٦

Artinya: Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadan-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali). (Qs. Al-Maidah:96).²¹

c. Penguasaan terhadap *Kala'* (Rumput-Rumputan) dan *Ajam*

Kala' adalah rumput-rumputan yang tumbuh ditanah yang tidak dianami yang digunakan untuk menggembalakan binatang. Sementara, *ajam* adalah pohon-pohon lebat yang tumbuh dihutan atau daerah yang tidak ada pemiliknya.

Hukum *kala'* adalah ia tidak boleh dimiliki meskipun tumbuh di tanah yang dimiliki. Ia boleh dimanfaatkan semua orang. Sementara, *ajam* merupakan harta yang mubah (boleh dimiliki) jika ia berada ditanah yang tidak dimiliki oleh siapapun.

d. Penguasaan terhadap *Ma'ādin* (Bahan Tambang) dan *Kunūz* (Harta Terpendam)

Ma'ādin adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam bumi dari awal penciptaan dan bersifat alami seperti emas, perak, tembaga, besi, nikel, dan sebagainya. Sementara, *kunūz*

²¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 164.

adalah harta yang ditimbun oleh manusia di dalam tanah, baik di masa jahiliah maupun di masa Islam.²²

Sudah diterangkan, bahwa salah satu dari sebab pemilikan atau malakiyah atau tamalluk, ialah: *ihrazul mubahat*. Maka yang dikatakan mubah itu, ialah:

الْمَالُ الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكٍ مُحْتَرَمٍ وَلَا يُؤْجَدُ مَتَاعٌ شَرْعِيٌّ مِنْ تَمْلِكِهِ

*Artinya: Harta yang tidak masuk ke dalam milik yang di hormati (milik seseorang yang tidak sah) dan tak ada pula suatu penghalang yang dibenarkan oleh syara' untuk memilikinya.*²³

Harta yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati inilah yang dikatakan mubah. Seperti air yang tidak dimiliki seseorang, rumput dan pepohonan di hutan belantara yang tidak dimiliki orang, binatang buruan dan ikan-ikan di laut. Ini semuanya barang mubah. semua orang dapat memiliki apa yang disebutkan itu. Apabila dia telah menguasai dengan maksud memiliki, menjadilah miliknya. Menguasai dengan maksud memiliki itu, dikatakan *ihraz*. Kemudian memiliki benda-benda yang mubah dengan jalan *ihraz*, memerlukan dua syarat:

- a. Benda itu tidak dikuasai orang lain lebih dahulu.

Umpamanya seseorang mengumpulkan air hujan dalam satu wadah dan dibiarkan, tidak diangkat ke tempat

²² Wahbah Az-Zuhaili (ed.), *Op.Cit*, hlm. 415.

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 11.

yang lain, maka orang lain tidak berhak lagi mengambil air dalam wadah itu, karena air ini tidak lagi merupakan benda mubah lantaran telah dikuasai oleh seseorang.²⁴ Sesuai hadits riwayat Abu Dawud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ. (رواه ابو داود)

Artinya: *Dari Abu Huroiror R.A Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa menguasai sesuatu yang belum dikuasai oleh seorang muslim maka ia berhak memilikinya” (HR Abu Dawud).*²⁵

b. Maksud *tamalluk* (untuk memiliki)

Jikalau seseorang memperoleh sesuatu benda mubah, dengan tidak bermaksud memilikinya, tidaklah benda itu menjadi miliknya. Umpamanya seorang pemburu meletakkan jaring (penangkap) lalu terjeratlah seekor binatang buruan, maka jika ia meletakkan jaringnya sekedar mengeringkan jaring itu, tidaklah ia berhak memiliki binatang buruan yang terjerat oleh jaringnya. Orang lain masih boleh mengambil itulah dipandang muhriz, bukan pemilik barang.²⁶

²⁴ *Ibid*, hlm. 13

²⁵ Abdurrahman bin abu Bakar, *al-Jami'u agh-Shoghair*, Juz I, Bandung: al-Ma'arif, hlm. 173.

²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.* hlm. 13.

2. *Al-Uqūd*

Al-Uqūd adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad jual beli, hibah, wasiat, dan sejenisnya merupakan sumber kepemilikan yang paling penting. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan yang membutuhkan distribusi harta kekayaan.²⁷

Macam-macam akad antara lain:

1. Akad *lazim* yaitu suatu bentuk akad yang mengikat kedua pihak, masing-masing akid tidak boleh membatalkan akad tersebut kecuali atas persetujuan pihak lain. Akad lazim ini berupa akad dengan penggantian, misalnya jual beli, sewa menyewa dan lainnya.
2. Akad *gairu lāzim* atau atau akad *tabarru'* yaitu suatu akad yang tidak mengikat kedua pihak, artinya bahwa setiap saat akad tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain, misalnya, akad pinjam meminjam, akad Wakālah, penitipan atau utang piutang, waqaf. Biasanya akad ini tidak terjadi penggantian.²⁸

Akad dilihat dari sebab kepemilikan, dapat di bedakan menjadi *uqud jabariyah* dan *tamlik jabari*.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit*, hlm. 45.

²⁸ Siti mujibatun, *Op.Cit*, hlm. 74.

1. *Uqud Jabariyah* (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya.
2. *Tamlik jabari* (pemilikan secara terpaksa) dibedakan menjadi dua. *Pertama*, pemilikan secara paksa atas *mal'iqar* (harta tidak bergerak) yang hendak di jual. Hak pemilikan paksa ini dalam term fiqh dinamakan denganhak syuf'ah. Hak ini dimiliki oleh sekutu atau tetangga. *Kedua*, pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Ketika ada kebutuhan memperluas bangunan masjid misalnya, maka syari'at Islam membolehkan pemilikan secara paksa terhadap yang berdekatan dengan masjid, sekalipun pemiliknya tidak berkenan untuk menjualnya. Demikian juga ketika ada kebutuhan umum kebutuhan perluasan jalan umum, tentunya dengan kompensasi yang sepadan.²⁹

Kompensasi yang sepadan yang dimaksud di sini adalah permintaan untuk menjual tanah dari si pemiliknya dengan harga yang logis secara paksa karena sebuah kebutuhan atau kemaslahatan umum seperti untuk memperluas masjid, jalan, dan sebagainya.

Seorang pemilik yang menggunakan cara ini memiliki barang tersebut berdasarkan akad jual beli paksa yang dilakukan atas keputusan pemerintah. Berdasarkan hal ini,

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit*, hlm. 46.

akad yang menimbulkan kepemilikan ada yang bersifat ridha dan ada yang bersifat paksa. Paksa itu ada yang bersifat nyata seperti dalam kasus menjual harta orang yang berutang dan ada yang tidak nyata sebagaimana dalam *Syuf'ah* dan mencabut kepemilikan.³⁰

3. *Al-Khalafiyah*

Al-Khalafiyah Adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Dengan demikian, ia dapat dibedakan menjadi dua kategori. *Pertama*, adalah penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya dalam hal waris. Dalam hukum waris, seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap harta yang di tinggalkannya (*tarikah*). *Kedua*, adalah penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada *tadlmin* (pertanggungan) ketika seseorang merusak atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widl* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan kerusakan harta benda orang lain.

4. *Al-Tawallud Minal Mamluk*

Al-Tawallud Minal Mamluk Adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya, setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili (ed.), *OP.Cit*, hlm. 418.

pemilikinya. Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan yang lain/baru).³¹

Bersifat produktif maksudnya adalah sesuatu yang terlahir dari sesuatu yang dimiliki akan menjadi milik si pemilik asalnya, karena pemilik asal (barang pertama yang dimiliki sejak awal) adalah pemilik *fara'* (benda kedua) juga, baik kepemilikan itu timbul karena perbuatan si pemilik asal, karena alam atau asal penciptaan.³²

D. Jenis-Jenis kepemilikan

Dilihat dari unsur harta (benda dan manfaat), kepemilikan dapat di bedakan menjadi:

1. *Milk at-Tamm* (kepemilikan sempurna)

Milk at-tamm adalah suatu kepemilikan yang meliputi benda dan sekaligus manfaatnya, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan *tam* bisa diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.³³

Dalam *milk at tamm*, pemilik memiliki hak mutlak atas kepemilikan ini tanpa di batasi dengan waktu. Selain itu, kepemilikan ini tidak bisa di gugurkan kecuali dengan jalan yang di benarkan syara'. Ia bebas melakukan transaksi, investasi, atau hal lainnya, karena ia memiliki dzat harta benda sekaligus

³¹ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit*, hlm. 46.

³² Wahbah Az-Zuhaili (ed.), *Op.Cit*, hlm. 418.

³³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Op.Cit*, hlm. 37.

manfaatnya. Jika ia merusak benda tersebut maka ia tidak berkewajiban menggantinya. Akan tetapi, dari sisi agama, ia bisa mendapat sanksi, karena merusak harta benda, haram hukumnya.³⁴

2. *Milk an-Naqish* (kepemilikan tidak sempurna)

Milk an-Naqish adalah kepemilikan terhadap bendanya saja atau manfaatnya saja. Memiliki manfaatnya saja disebut dengan hak *intifa'* (hak penggunaan). Memiliki manfaat boleh jadi hak individu bagi orang yang memanfaatkan, artinya mengikuti pada dirinya dan bukan pada benda yang dimilikinya. Dan boleh jadi juga adalah hak benda, artinya selalu mengikuti pada benda, terlepas dari diri atau individu yang memanfaatkannya. Hak ini dinamakan hak *irtifaq* dan ia hanya berlaku pada *aqar*.

Kepemilikan terhadap benda saja adalah benda tersebut milik seseorang tetapi manfaatnya milik orang lain, seperti seseorang mewasiatkan pada orang lain untuk menempati rumahnya atau bercocok tanam di tanahnya selama hidupnya atau selama tiga tahun misalnya. Apabila orang yang mewasiatkan tersebut meninggal dan orang yang diwasiatkan sudah menerima wasiatnya, rumah tersebut menjadi milik ahli waris dari orang yang mewasiatkan. Sementara, orang yang diwasiatkan hanya memiliki manfaatnya selama hidupnya atau selama masa tertentu. Apabila masa tersebut berakhir maka manfaatnya menjadi milik ahli waris

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit*, hlm, 36.

dari orang yang mewasiatkan. Dengan demikian, kepemilikan mereka terhadap itu menjadi sempurna.³⁵

Kepemilikan manfaat adalah hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang di benarkan oleh syariah. Pemilikan ini dapat diperoleh melalui lima sebab, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, *i'arah* adalah pemindahan kepemilikan manfaat tanpa adanya kompensasi. Orang yang meminjamkan (*musta'i*) diperbolehkan kepada pihak lain, tetapi tidak boleh menyewakan (*ijarah*), karena *i'arah* adalah akad *gairu lāzim*, Menurut pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, *i'arah* adalah membolehkan orang lain untuk mengambil suatu manfaat tanpa ada kompensasi. Dengan demikian, *musta'ir* tidak diperkenankan meminjamkan kepada orang lain.
2. *Ijarah* adalah akad pemindahan pemilikan manfaat dengan kompensasi. Penyewa berhak mendapatkan manfaat atas barang yang disewa, namun tidak memiliki hak apapun atas bentuk fisik barang yang disewakan. Hak yang dimiliki adalah hak manfaat.
3. Waqaf adalah amanah harta benda milik seseorang yang diperuntukkan kepada orang yang diwakafi (*mauquf alaih*). Dengan adanya wakaf dimungkinkan terjadinya pemindahan pemilikan manfaat dari orang yang mewakafkan (*waqif*) kepada

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili (ed.), *Op.Cit*, hlm. 405.

mauquf alahi yang diperkenankan untuk mengambil nilai manfaat untuk pribadinya atau untuk orang lain.

4. *Washiyyah bil manfa'ah* adalah sebuah kesepakatan seseorang yang memberikan wasiat kepada orang lain untuk mengambil nilai suatu manfaat.
5. *Al-ibahah* adalah sebuah perizinan untuk mengonsumsi barang atau menggunakannya, seperti izin untuk memakan buah-buahan, mengendarai mobil seseorang, izin untuk menggunakan fasilitas umum. Perizinan ini hanya diberikan kepada orang yang mendapatkan izin, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain untuk menikmati manfaatnya.³⁶

Ada beberapa ciri khusus *al-milku tam* dan *al-milku an-naqish*. Yang menjadi ciri khusus *al-milku al-tam* yaitu:

1. Sejak awal, kepemilikan terhadap materi itu dan manfaat harta itu bersifat sempurna.
2. Kepemilikan tidak dimiliki oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya.
3. Kepemilikan tidak di batasi waktu.
4. Kepemilikan tidak boleh digugurkan.
5. Apabila kepemilikan itu kepunyaan bersama, maka masing-masing dianggap bebas menggunakan miliknya, sebagaimana milik mereka masing-masing.

³⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 59.

Adapun ciri-ciri khusus *milku an-naqish*, yaitu:

1. Boleh di batasi waktu, tempat, dan sifatnya.
2. Tidak boleh diwariskan menurut ulama hanafiah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumhur ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.
3. Orang yang memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya, kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan ia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.
4. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya, seperti hewan ternak harus diberi makan, dan mobil harus di bersihkan dan diisi bensinnya dan di ganti olinya, dan seterusnya.
5. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali apabila orang yang memanfaatkan harta itu mendapat madharat dengan pengembalian harta itu.

Kepemilikan menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah prinsip kepemilikan *amwal* adalah:³⁷

³⁷ Mardani, *Op.Cit*, hlm. 68.

1. Pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu.
2. Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu.
3. Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan.
4. Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah *tasharuuf*-nya.
5. Pemilikan syarikat yang penuh di-*tasharruf*-kan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.³⁸

E. Hikmah kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain dalam garis besarnya:

1. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
2. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.
3. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah SWT. yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh rida-Nya.

³⁸ *Ibid*, hlm. 69.

4. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara' dalam memiliki harta.
5. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah SWT.³⁹

F. Hukum Syara'

Hukum syar'i atau hukum syara' adalah kata majemuk yang tersusun dari kata hukum dan kata syara'.⁴⁰ Hukum dalam konsep *Ushul Fiqh*, dibagi dua macam yaitu: hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk *al-iqtida*, *at-takhyir* dan *al-wad'i*. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan.⁴¹

Dengan memerhatikan pengertian hukum sebagaimana tersebut diatas, maka nyatalah bahwa hukum itu ada yang mengandung *thalal* (tuntunan), ada yang mengandung keterangan sebab, syarat, mani', (pencegah berlakunya hukum), shah, batal, rukhshah, dan azimah.

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 50.

⁴⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), hlm. 95.

⁴¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hlm. 73.

Hukum yang mengandung tututan (suruhan atau larangan) dinamakan hukum *taklify*, hukum yang mengandung *takyir* (kebolehan mengerjakan dan tidak mengerjakan) dinamakan hukum *takhyiri*, hukum yang menerangkan sebab, syarat, mani', shah, batal, azimah, dan rukhshah dinamakan hukum *wadh'iy*.⁴²

Kebanyakan ulama membagi hukum kepada dua jenis saja, hukum *taklify* dan hukum *wadh'iy*. Berikut penjelasan masing masing:

1. *Hukum Taklify*

Ada beberapa hukum *tkalify* yaitu: *Ijab* (mewajibkan) yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan pasti. *Nadb* (anjaran supaya dikerjakan) yaitu mengandung suatu suruhan yang tidak mesti dikerjakan, hanya merupakan anjaran melaksanakannya. *Tahrim* (mengharamkan) yaitu mengandung larangan yang mesti di jauhi. *Karohah* (membencikan) yaitu mengandung larangan namun tidak musti di jauhi ketidak mustian menjauhi itu diperbolehkan dari qorinah-qorinah yang terdapat disekelilingnya yang mengubah larangan itu dari ditinggalkan kepada tidak musti ditinggalkan. *Mubah* ialah sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan.

2. *Hukum Takhyiry*

Hukum yang memberikan hak memilih atau ibadah, yakni titah yang menerangkan kebolehan kita mengerjakan atau tidak

⁴² Ahmad Sanusi dan Sohari, *Op.Cit*, hlm. 96.

mengerjakan pekerjaan yang dititahkan. Titah itu dinamakan ibadah, sedangkan pekerjaannya dinamakan mubah.⁴³

3. *Hukum Wadh'iy*

Hukum *wadh'iy* ialah firman yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain (*musabab*) atau sebagai syarat yang (*masyurut*) lain atau sebagai penghalang (*mani'*) adanya yang lain hukum *wadh'iy* dibagi tiga yaitu: Sebab ialah sesuatu yang terang dan tertentu yang dijadikan sebagai pangkal adanya hukum (*musabab*), artinya dengan adanya sebab maka dengan sendirinya akan terwujud hukum atau *musabab*. Syarat yaitu sesuatu yang menyebabkan adanya hukum, dan dengan ketiadaannya berarti tidak ada hukum. *Mani'* yaitu suatu hal yang karena adanya menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak adanya sebab bagi hukum.⁴⁴

Berdasarkan hal ini, maka sistem Islam mengakui hak manusia untuk mendapatkan kepemilikan individu, memberinya hak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya, dan melakukan pentasharufan terhadap hartanya selama hidupnya sampai setelah meninggal dunia pada batasan-batasan tertentu yang bisa terbilang jauh lebih luas dari pada apa yang diberikan oleh sistem komunisme. Akan tetapi, di sisi lain, sistem Islam tidak memberikan kekuasaan dan

⁴³ *Ibid*, hlm. 98.

⁴⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Op.Cit*, hlm. 76

wewenang yang mutlak kepada seseorang terhadap harta yang dimilikinya tanpa ada suatu batasan dan kontrol apapun sebagaimana yang dilakukan oleh sistem kapitalis. Sistem Islam tidak memperbolehkan tindakan riba dan monopoli, juga tidak memperbolehkan sikap menjadikan kepemilikan sebagai jalan untuk pemanfaatan dan pengeksploitasian yang haram dan melampaui batas. Oleh karena itu, sistem Islam menggabungkan antara nilai-nilai yang baik dari masing-masing sistem kapitalis dan sistem sosialis, serta meninggalkan jauh-jauh sisi-sisi yang menyimpang dan ekstrim yang terdapat di dalam kedua sistem itu.⁴⁵

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili (ed.), *Op.Cit*, hlm. 472-473.

BAB III

PRAKTEK NGGANCAR KETELA DI DESA GEMBONG KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

A. Gambaran umum Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penelitian ini penulis akan menguraikan secara mengenai: kondisi geografis dan kondisi demografis. Kondisi demografis terbagi dalam susunan pemerintahan, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, sosial pendidikan, dan sosial keagamaan.

1. Kondisi Geografis

Desa Gembong terletak di lereng bagian timur gunung Muria berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus. Dari pusat kota Kabupaten Pati, berjarak 12 km ke arah barat laut. Desa Gembong terdiri dari 8 dukuh, yaitu dukuh Pohgading, dukuh Selorejo, dukuh Ngembes, dukuh Godang, dukuh Bergat, dukuh Sentul, dukuh Karangdalem, dukuh Seloromo.¹ Desa yang berada di Kecamatan

¹ Hasil wawancara dengan Nur Kholis selaku Kepala Desa Gembong pada tanggal 20 Maret 2018.

Gembong ini mempunyai luas wilayah 767,04 Ha dengan perincian :

Tabel 3.1
Luas Wilayah Desa Gembong Menurut
Penggunaan

No	Penggunaan	Luas Wilayah	Persentase
1	Luas tanah sawah	142,50 Ha	18,57%
2	Luas tanah kering	560,78 Ha	73,08%
3	Luas tanah basah	0,00 Ha	0%
4	Luas tanah perkebunan	0,00 Ha	0%
5	Luas fasilitas umum	63,76 Ha	8,3%
6	Luas tanah hutan	0,00 Ha	0%
7	Jumlah	767,4 Ha	100%

Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data profil Desa dan Perkembangan Desa Gembong 12 juli 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Gembong Kecamatan Gembong Luas tanah yang memiliki areal terbesar adalah lahan tanah kering memiliki presentase 73,08% dengan luas tanah 560,78 Ha dari luas tanah keseluruhan yang berjumlah 767,4 Ha

Batas-batas wilayah di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati meliputi:

Sebelah Utara : Desa Bageng

Sebelah Selatan : Desa Bermi

Sebelah Timur : Desa Wonosekar

Sebelah Barat : Desa Plukaran²

2. Kondisi Demografis

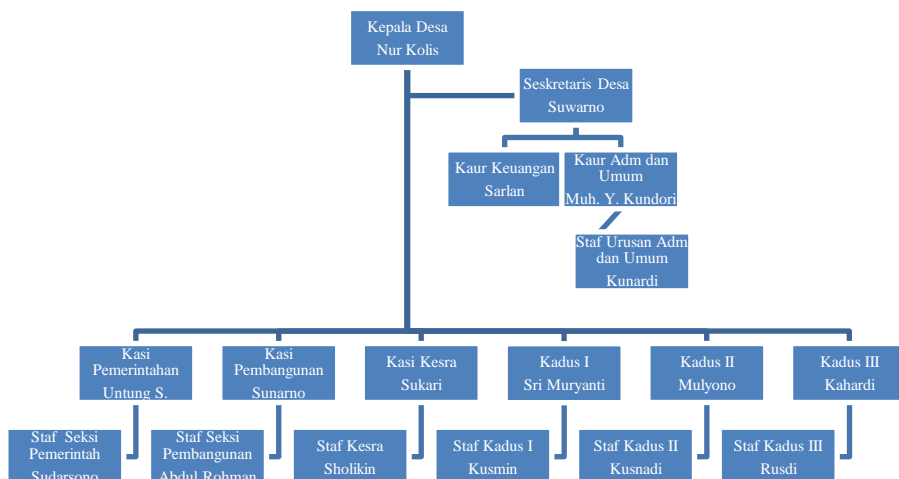
a. Susunan Pemerintahan

Berikut pada tabel dua menerangkan struktur pemerintahan Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati.

² Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Gembong 12 juli 2017.

Bagan 3.2

Struktur Pemerintah Desa Gembong



*Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data profil Desa
dan Perkembangan Desa Gembong 12 juli 2017*

b. Keadaan Penduduk

Desa Gembong memiliki 8 Dukuh dengan jumlah RW (Rukun Warga) sebanyak 16 (Enam belas) dan RT (Rukun Tetangga) sebanyak 60 (Enam puluh). Jumlah kepala keluarga sebanyak 3642 KK dengan jumlah penduduk Desa Gembong Dengan keseluruhan 9849 orang, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4884 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 4965, penduduk pendatang 57 orang dan penduduk yang pergi 99 orang.

Tabel 3.3

Daftar Jumlah Penduduk Desa Gembong

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	4884	49%
2	Perempuan	4965	51%
3	Jumlah	9849	100%

Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data profil Desa dan Perkembangan Desa Gembong 12 juli 2017

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki mencapai 50% dengan jumlah 4965 dari jumlah keseluruhan 9849

dengan selisih 81 jiwa lebih banyak dari penduduk laki-laki.

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga, sebagai desa pertanian dengan di tunjang lahan pertanian yang cukup luas, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Gembong adalah bertani, yakni petani singkong, padi, dan tebu.³ Bukan berarti hal demikian semua penduduk Desa Gembong bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani. Selain bertani, penduduk Desa Gembong juga bervariasi dalam pekerjaannya. Data jenis pekerjaan penduduk Desa Gembong adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Daftar Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa
Gembong

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Persentase
1	Petani	1948 Jiwa	643 Jiwa	22,4%
2	Pegawai Negri Sipil	87 Jiwa	82 Jiwa	1,46%
3	Pedagang Barang	32 Jiwa	163 Jiwa	1,69%

³ Hasil wawancara dengan Nur Kholis Gembong selaku Kepala Desa Gembong pada tanggal 20 Maret 2018.

	Kelontong			
4	Nelayan	27 Jiwa	0 Jiwa	0,23%
5	Montir	31 Jiwa	0 Jiwa	0,27%
6	Dokter Swasta	2 Jiwa	1 Jiwa	0,03%
7	Bidan Swasta	1 Jiwa	1 Jiwa	0,02%
8	Guru Swasta	13 Jiwa	27 Jiwa	0,35%
9	Dosen Swasta	2 Jiwa	0 Jiwa	0,02%
10	Pedagang Keliling	18 Jiwa	4 Jiwa	0,19%
11	Pembantu Rumah Tangga	0 Jiwa	72 Jiwa	0,62%
12	Karyawan Perusahaan Swasta	494 Jiwa	213 Jiwa	6,11%
13	Karyawan Perusahaan Pemerintah	83 Jiwa	39 Jiwa	1,05%
14	Belum Bekerja	1226 Jiwa	1277 Jiwa	21,64%
15	Pelajar	1058 Jiwa	1015 Jiwa	17,92%
16	Ibu Rumah Tangga	0 Jiwa	3121 Jiwa	26,98%
17	Buruh Harian Lepas	12 Jiwa	0 Jiwa	0,1%
18	Buruh Jasa Hasil Bumi	5 Jiwa	3 Jiwa	0,07%
19	Pemilik Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	4 Jiwa	0 Jiwa	0,3%
20	Buruh Jasa Transportasi dan Perhubungan	13 Jiwa	0 Jiwa	0,11%
21	Buruh Usaha Jasa Informasi dan Komunikasi	36 Jiwa	5 Jiwa	0,35%
22	Buruh Usaha Jasa dan Hiburan	3 Jiwa	0 Jiwa	0,03%
23	Buruh Usaha Rumah Makan dan Restoran	39 Jiwa	42 Jiwa	0,7%
24	Dukun/Paranormal/S upranatural	5 Jiwa	0 Jiwa	0,04%

25	Jasa Pengobatan Alternatif	6 Jiwa	0 Jiwa	0,05%
26	Jasa Penyewaan Alat Pesta	6 Jiwa	0 Jiwa	0,05%
27	Pemulung	3 Jiwa	0 Jiwa	0,03%
28	Juru Masak	0 Jiwa	15 Jiwa	0,13%
29	Karyawan Honorer	81 Jiwa	36 Jiwa	1,01%
30	Pemuka Agama	15 Jiwa	5 Jiwa	0,17%
31	Apoteker	1 Jiwa	1 Jiwa	0,02%
Jumlah		11.566 Jiwa		100%

Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data profil Desa dan Perkembangan Desa Gembong 12 juli 2017

Data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Gembong berpotensi sebagai petani dengan presentase mencapai 22,4% berjumlah 2141 jiwa dari jumlah total keseluruhan 11.566 jiwa. Potensi sebagai petani menghasilkan beberapa hasil pertanian. Desa Gembong Kecamatan Gembong didukung dengan luas lahan sawah mencapai 142,50 Ha, dengan komoditas utama Ketela Pohon luasan tanam 331,66 Ha dengan luas panen 331,66 Ha.⁴

d. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan mempunyai fungsi untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan pendidikan, karena pendidikan

⁴ Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Gembong Tahun 2017.

merupakan hal penting dalam kehidupan, dengan adanya pendidikan dapat terlihat tingkat kecerdasan penduduk. Menunjang meratanya pendidikan di Desa Gembong, maka dibangun lembaga pendidikan sebagai instrumen penunjang untuk meningkatkan pendidikan masyarakat sekitar. Berikut ini adalah tabel jumlah:

Tabel 3.5

Daftar Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Jenis Lembaga	Sewa	Milik Sendiri	Persentase
1	SMA- /Sederajat	0	2	8,7%
2	SD/Sederajat	0	5	21,74%
3	TK	0	7	30,43%
4	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama	0	8	34,78%
5	Perpustakaan Desa	0	1	4,35%
6	Jumlah	23		100%

Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data profil Desa dan Perkembangan Desa Gembong 12 juli 2017

Data diatas merupakan data sarana prasarana penunjang pendidikan yang ada di Desa Gembong, berikut akan diberikan rincian tentang tingkat

pendidikan penduduk Desa Gembong, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6
Daftar Jenjang Pendidikan Desa Gembong

N o	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Persentase
1	Tamat SD/Sederajat	1273 Jiwa	1325 Jiwa	47,01%
2	Tamat SMP/Sederajat	764 Jiwa	736 Jiwa	27,14%
3	Tamat SMA/Sederajat	550 Jiwa	528 Jiwa	19,51%
4	Tamat D1/Sederajat	36 Jiwa	20 Jiwa	1,01%
5	Tamat D2/Sederajat	31 Jiwa	33 Jiwa	1,16%
6	Tamat D3/Sederajat	35 Jiwa	23 Jiwa	1,05%
7	Tamat S1/Sederajat	98 Jiwa	70 Jiwa	3,04%
8	Tamat S2/Sederajat	4 Jiwa	0 Jiwa	0,07%
9	Jumlah	5526		100%

Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data profil Desa dan Perkembangan Desa Gembong 12 juli 2017

Tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Gembong masih rendah. Terlihat dari sedikitnya jumlah penduduk yang lulusan S2 yaitu hanya berjumlah 4 jiwa 0,07%, untuk lulusan

S1 hanya 168 jiwa 3,04%, lulusan SMA berjumlah 1078 jiwa 19,51%, lulusan SMP berjumlah 1500 jiwa 27,14%, lulusan SD berjumlah 2598 jiwa 47,1% memiliki jumlah presentase tertinggi. Dapat di simpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Gembong masih rendah, hal ini dapat di lihat dari besarnya angka penduduk yang hanya lulusan SD dari jumlah keseluruhan 5526 .

e. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Gembong mayoritas memeluk agama Islam.⁵ Hal ini di tandai dengan adanya fasilitas keagamaan berupa 8 (delapan) buah baik pondok pesantren maupun sarana pendidikan yang berbaur agama, masjid yang berjumlah 11 (sebelas) buah, dan mushola atau langgar yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) buah. Selain beragama Islam di Desa Gembong juga ada yang menganut agama kristen, dan Gereja yang berjumlah 1 (satu) buah.

⁵ Hasil wawancara dengan Nur Kholis selaku Kepala Desa Gembong pada tanggal 20 Maret 2018.

Tabel 3.7
Daftar Prasarana Peribadatan Desa
Gembong

No	Nama Sarana	Jumlah	Persentase
1	Masjid	11 Buah	18,33%
2	Mushola/Surau/Langgar	48 Buah	80%
3	Greja Kristen Protestan	1 Buah	1,67%
4	Jumlah	60	100%

*Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data profil Desa
dan Perkembangan Desa Gembong 12 juli 2017*

Kehidupan masyarakat desa Gembong yang bisa dikatakan dalam peribadatan atau dalam sisi keagamaannya masyarakat sangat agamis karena dalam catatan yang diperoleh masyarakat desa rata-rata memeluk agama Islam dilihat dari tempat peribadatan jumlah masjid ada 11 buah 18,33% dan mushola 48 buah 80% gereja 1 buah 1,67%, dan di desa ini melakukan rutinitas keagamaan seperti shalat, tadarusan, tahlilan setiap Kamis sore, sholawatan, yasinan dan pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu yang dilakukan di setiap rumah warga secara bergiliran, dari

satu rumah ke rumah yang lain di setiap dusun yang ada di desa Gembong. Masyarakat desa Gembong juga masih melestarikan tradisi turun temurun dari nenek moyang yaitu tradisi sedekah bumi. Berdasarkan hal ini masyarakat desa Gembong kental akan kebudayaannya.⁶

B. Proses Penanaman Ketela Sampai Panen

Proses penanaman Ketela di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dikerjakan melalui proses manual dengan tenaga manusia. Aktivitas penanaman singkong ini biasanya dilakukan pada musim penghujan, dengan tujuan supaya tunas stek singkong cepat tumbuh karena cukup air, jika ditanam pada musim kemarau stek singkong akan kering dan tunas tidak dapat hidup. Karena tidak memungkinkan jika disiram satu persatu sebab luasnya lahan.⁷ Untuk tahapan-tahapan penanaman singkong sampai masa panen adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bibit

Pada masa panen tiba masyarakat Desa Gembong memilih bibit yang nantinya akan ditanam lagi. Dalam

⁶ Hasil wawancara dengan Nur Kholis selaku Kepala Desa Gembong pada tanggal 20 Maret 2018.

⁷ Hasil wawancara dengan Sarju selaku petani ketela pada tanggal 23 Maret 2018.

menyiapkan bibit ketela, dilakukan dengan memotong batang ketela menjadi beberapa potongan dengan ukuran panjang sekitar 20 cm karena bibit ketela berasal dari batang ketela yang berkualitas. Batang ketela dapat dipotong lurus juga dapat dipotong miring, pemilihan bibit yang baik akan sangat berpengaruh terhadap hasil panen.

Gambar 3.1

Bibit Ketela



Sumber: Dokumentasi data primer 2018

Bibit yang baik untuk bertanam ketela pohon harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Ketela pohon yang akan digunakan sebagai bibit harus dari induk yang cukup tua (10-12 bulan).
- b. Ketela pohon dipilih dari pertumbuhannya yang normal dan sehat serta seragam.

- c. Batangnya berkayu dan berdiameter + 2,5 cm lurus.
- d. Belum tumbuh tunas-tunas baru.
- e. Pilih pada bagian tengah batang kira-kira panjangnya 2-3 meter.

2. Pembersihan Lahan

Pembersihan lahan adalah kliring dari semua jenis tanaman pengganggu (gulma) dan rumput sebelum tanam. Tujuan dari pembersihan lahan adalah supaya akar dan tunas stek ketela tumbuh mudah. Menghilangkan rumput dan tanaman yang dapat menghambat pertumbuhan ketela supaya tidak menjadi sebab tumbuhnya hama dan penyakit yang mungkin tumbuh merusak tanaman ketela.⁸ Luas lahan budidaya yang akan digarap disesuaikan dengan modal masing-masing petani penggarap yang menyewa lahan, kecuali bagi petani yang sudah memiliki lahan sendiri tanpa menyewa, maka akan lebih murah karena tidak mengeluarkan biaya untuk sewa lahan. Bagi yang memiliki modal lebih masyarakat Desa Gembong akan menyewa lahan untuk ditanam ketela, seperti menyewa bengkok pemerintah desa, hal ini sudah biasa bagi masyarakat Desa Gembong. Namun pengaturan volume dan harga sewa lahan garapan penting juga diperhitungkan oleh petani penggarap karena berkaitan erat dengan

⁸ Hasil wawancara dengan Suparman selaku penjual atau petani ketela pada tanggal 23 Maret 2018.

perkiraan harga pada saat panen nantinya. Termasuk pada saat panen raya tiba diprediksi harga akan turun, karena penanaman terjadi di daerah-daerah lain yang menyebabkan membludaknya jumlah barang saat panen. Hal itu dapat diatur serinci mungkin.⁹

Dalam persiapan lahan ini petani harus paham tanah yang cocok untuk ketela pohon adalah tanah yang berstruktur remah, gembur, tidak terlalu liat dan tidak terlalu poros serta kaya bahan organik. Tanah dengan struktur remah mempunyai tata udara yang baik. Jenis tanah yang sesuai untuk tanaman ketela pohon adalah jenis mediteran, andosol, aluvial latosol, grumosol, dan podsolik merah kuning.

Untuk penggunaan yang luasnya mencapai 1 Ha, kalau ada rumputnya yang perlu dilakukan pertama kali adalah menyemprot rumput dengan obat roundup dan dibiarkan sekitar Empat hari supaya rumputnya benar-benar kering dan mati. Tahapan selanjutnya adalah membajak tanah sebelum ditanami ketela, bertujuan supaya hasil panen banyak dan memiliki ukuran besar serta menambah kesuburan tanah. Pembajakan dilakukan

⁹ Hasil wawancara dengan Suparman selaku penjual atau petani ketela pada tanggal 23 Maret 2018.

dengan mesin traktor atau bisa juga menggunakan cara tradisional yaitu menggunakan bajak sapi.¹⁰

3. Penanaman bibit dan pembuatan talut

Talut dibuat saat proses pembersihan lahan sudah selesai, talut atau pelarikan gundukan tanah yang dibuat dengan cara dicangkul ini dilakukan supaya mempermudah penanaman, sesuai dengan jarak yang dikehendaki. Pembentukan talut ditujukan untuk memudahkan dalam pemeliharaan tanaman, seperti pembersihan dari tanaman liar, untuk sehatnya pertumbuhan tanaman karena cukupnya ruang dan tata letak bibit ketela rapi tidak berantakan sebab telah dibuatkan larikan, serta jika ada hujan air yang mengalir teratur, tidak merusak bibit yang ditanam yang bisa berakibat robohnya pohon ketela.¹¹

Selanjutnya bibit ketela yang telah dipotong-potong dapat langsung ditanam kelahan, tanam bibit ketela dengan jarak 100 cm x 100 yaitu jara antara bibit satu dengan bibit yang lain, karena tanaman ketela harus memiliki ruang untuk akar-akarnya tumbuh. Dalam menanam bibit ketela yang harus diperhatikan adalah arah tunas, jangan sampai terbalik. Kita dapat melihat arah

¹⁰ Hasil wawancara dengan Waji selaku petani ketela pada tanggal 24 Maret 2018.

¹¹ Hasil wawancara dengan Waji selaku petani ketela pada tanggal 24 Maret 2018.

tunas di tonjolan bekas daun singkong yang lepas. Pada posisi tersebut dapat terlihat anak tunas. Pastikan anak tunas menghadap ke atas, supaya tunas yang tumbuh tidak terbalik.

Gambar 3.2
Penanaman Bibit



Sumber: Dokumentasi data primer 2018

Masa tanaman harus memperhatikan musim dan curah hujan. Pada lahan kering, waktu tanam yang paling baik jatuh pada awal musim hujan. Penanaman bibit ketela dilakukan dengan cara menancapkan ujung bibit bawah ke tanah yang sudah dibuatkan gundukan, ditancapkan sedalam kurang lebih sepertiga bagian bibit tertimbun kedalam tanah.¹²

¹² Hasil wawancara dengan Parmo selaku petani ketela pada tanggal 27 Maret 2018.

4. Pemupukan

Pemupukan pertama bersamaan dengan pemangkasan ranting yang melebihi dua cabang pertama dilakukan pada saat bibit sudah berumur 2-3 bulan dengan pupuk urea, pusaka, dan pusri. Supaya lebih baik kualitas ketela dilakukan pemupukan kedua bisa dilakukan pada bulan ke Empat-Lima dari penanaman agar ketela dapat lebih besar hasilnya saat dipanen. Untuk membesarkan ketela pada pemupukan kedua biasanya menggunakan pupuk pusaka yang telah dicampur dengan pupuk urea.¹³

5. Panen

Ketela pohon dapat dipanen saat warna daun mulai menguning dan tipis serta banyak yang rontok semakin ke atas, pertumbuhan daun bawah mulai berkurang, isi ketela sudah besar bisa dilihat dengan menggali tanah pada bagian ketela. Pemanenan ketela umumnya pada usia sekitar minimal 9 sampai 12 bulan.

Pemanenan dilakukan dengan cara memotong batang ketela kira-kira dari tanah ke atas $\frac{1}{2}$ meter, kemudian ketela dicabut secara manual dan ketela yang tertinggal dapat diambil dengan cangkul. Tanah yang gembur tadi tentunya akan sangat membantu mengurangi ketela tertinggal saat dicabut. Ketela dipisahkan dari pohon

¹³ Hasil wawancara dengan Waji selaku petani ketela pada tanggal 24 Maret 2018.

dengan cara memotong dengan menggunakan parang pada bagian pangkal ketela jangan sampai terkena daging ketelanya karena bisa menyebabkan ketela busuk dalam kurun waktu dekat.

Gambar 3.3

Ketela siap panen



Sumber: Dokumentasi data primer 2018.

Setelah panen, kumpulkan semua batang pohon ketela yang tersisa untuk membersihkan lahan supaya dapat ditanami kembali. Sisa batang pohon ketela ini dapat dijadikan bibit untuk proses penanaman selanjutnya atau dibakar pada lahan pertanian tersebut sehingga arang dari sisa pembakaran batang bisa menjadi pupuk organik.¹⁴

¹⁴ Hasil wawancara dengan Suparman selaku penjual atau petani ketela pada tanggal 23 Maret 2018.

C. Praktek *Nggancar* Ketela di Desa Gembong

Desa Gembong merupakan salah satu desa yang mempunyai hasil pertanian cukup besar. Sebagian dari penduduk desa gembong bermata pencaharian sebagai petani dengan disokong luas tanah sebanyak 331,66 Ha, dari jumlah total luas keseluruhan tanah yang mencapai 767,4 Ha. Dari data tersebut lahan kering lebih mendominasi dibandingkan dengan lahan basah, dari lahan kering itulah rata-rata warga desa gembong menjadikan sebagai kebun ketela.

Ketela siap panen, mulai proses penanaman sampai masa panen pada umumnya membutuhkan waktu 9 sampai 12 bulan. Proses pemanenan ketela di Desa Gembong terdapat dua praktek, pertama, dipanen oleh pemilik kebun dengan cara menyewa beberapa orang untuk memanen ketela. Kedua dengan cara *ditebaskan* kepada tengkulak, pemilik kebun langsung menerima harga ketela tersebut.

Proses pemanenan ketela, baik dilakukan pemilik kebun maupun yang *ditebasakn*, masih meninggalkan sisa-sisa ketela di dalam tanah. Sisa-sisa ketela tersebut yang oleh masyarakat sekitar (bukan pemilik kebun maupun penebas) masih dapat dimanfaatkan. Oleh karenanya, masyarakat mengambil sisa-sisa tersebut, praktek ini oleh masyarakat disebut dengan *nggancar*.

Praktek *nggancar* di Desa Gembong merupakan kegiatan mencari sisa ketela yang tertinggal di dalam tanah,

yaitu ketela yang sudah tidak diperlukan lagi oleh penebas maupun pemilik kebun setelah dipanen. kegiatan *nggancar* ini dilakukan ketika musim panen ketela tiba, selain di desanya sendiri, mereka juga mencari sisa ketela ke desa tetangga yang kebunnya dipanen.

Bagi sebagian orang kebun yang sudah dipanen merupakan rejeki tersendiri, karena dari hasil lahan itulah mereka bisa mendapatkan sisa ketela. Oleh karena itu, jika musim panen ketela telah tiba mereka yang sudah terbiasa mencari rejeki dengan cara mengumpulkan sisa-sisa ketela atau biasa disebut *nggancar* mencari lahan yang sudah dipanen untuk melakukan aktifitasnya, dari sisa ketela yang tertinggal di dalam tanah itulah para penggancar mengambil ketela.

Pada saat ketela dipanen mereka mengetam, biasanya masih ada ketela yang tertinggal di dalam tanah yang luput dari panen bisa dikatakan sebagai suatu kesengajaan dalam rangka pemerataan pendapatan antara pemilik lahan dengan *penggancar*, kuli tebasan membiarkan saja agar sisa panen yang tertinggal tersebut dapat diambil oleh para *penggancar*, rata-rata dari mereka *penggancar* adalah masyarakat desa lain yang tidak mempunyai lahan bahkan tidak mempunyai profesi, sehingga mendorong niat mereka untuk *nggancar*.

Di Desa Gembong orang yang *Nggancar* datang ke kebun ketela mulai dari jam 06.00 WIB. Pada umumnya, para pencari sisa ketela (*nggancar*) datang dengan cara

berkelompok dan sendiri-sendiri, tapi kebanyakan para pencari ini datang dengan sendiri-sendiri. Peralatan yang digunakan cukup sederhana yakni hanya menggunakan karung sebagai tempat mengumpulkan ketela dan garpu kebun untuk menggali jika ada sisa ketela yang masih tertinggal di dalam tanah.

Warga Desa Gembong pada umumnya berangkat *nggancar* mulai jam 06.00 WIB. Pada jam tersebut, selain bisa mengambil sisa ketela, mereka juga bisa mengambil daun ketela untuk dijadikan sebagai pakan ternak. Bagi mereka yang tidak membutuhkan pakan ternak bisa berangkat siang hari yakni jam 01.30 WIB, mereka datang ke kebun yang telah selesai dipanen dengan berpakaian selayaknya. Berangkat dari rumah ke kebun dengan membawa peralatan tambahan berupa karung untuk mengumpulkan hasil *nggancar* dan garpu untuk menggali jika masih ada sisa ketela yang masih tertinggal di dalam tanah. Setelah sampai di kebun pencari langsung mengelilingi kebun sambil mencari sisa-sisa ketela, jika proses *nggancar* dilakukan ketika masih dalam proses pengumpulan atau pada saat sipenebas belum selesai dalam melakukan panen, biasanya mereka ikut juga mengambil ketela yang utuh dan dimasukan ke dalam keranjang tanpa minta izin penebas dan tidak jarang pula mereka tidak tau siapa penebas.¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara dengan Samadi selaku mandor kuli tebasan pada tanggal 22 Maret 2018.

Bapak Anto merupakan salah satu warga yang sehari-harinya di isi dengan *nggancar* ketika musim panen tiba. Jika musim panen tiba dia biasa mencari sisa panen yang tertinggal, diambilnya sisa ketela sambil di kumpulkan kedalam karung yang dia siapkan, selain *nggancar* di desanya kadang-kadang juga mencari ketela ke desa tetangga yang juga habis dipanen. Sesampainya dikebun, Bapak Anto langsung mengambil tanpa menghiraukan siapa pemilik kebun dan tidak meminta izin dulu kepada pemilik atau penebas yang ketelanya *digancar*. Bapak Anto berfikirkan pemilik lahan akan ikhlas jika yang diambil ketela sisa saja, tanpa harus meminta izin kepada pemilik terlebih dahulu. Ketela itupun dikumpulkan sedikit demi sedikit dari tempat satu ketempat lain jika sudah terkumpul banyak kemudian dibawa pulang. Hasil yang diperoleh tidak menentu kadang mendapat dua karung kadangkun hanya mendapat setengah karung, sedangkan hasil dari *nggancar* dihargai 1000 rupiah perkilo separuh dari harga normal akan tetapi denga harga tersebut bapak Anto mendapatkan hasil yang lumayan rata-rata bisa mencapai 150 ribu rupiah bahkan bisa lebih.¹⁶ Begitu juga dengan bapak Suratman *penggancar* dari desa sebelah, dia juga termasuk salah satu masyarakat yang berprofesi *nggancar*. Menurutnya sisa-sisa ketela tersebut bisa diambil tanpa meminta izin dari

¹⁶ Hasil wawancara dengan Anto selaku *penggancar* pada tanggal 25 Maret 2018.

pemilik atau penebas. Penghasilan bapak Suratman dalam sehari kurang lebih mencapai 200 ribu rupiah.¹⁷

Beda halnya dengan bapak Supar biasa *nggancar* menuju kebun yang dia tau siapa pemiliknya, dia meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil ketela sisa, bapak supar dalam proses *nggancar* pilih-pilih tidak sembarang saat mengambil hanya yang tertinggal didalam tanah dan tidak dimanfaatkan lagi oleh sipenebas atau pemilik lahan saja. Penghasilan bapak supar dalam sehari rata-rata mencapai 80 ribu rupiah.¹⁸ Begitu juga dengan bapak Kunarso. Dia *penggancar* yang berasal dari desa yang sama dengan bapak Supar, sebelum *nggancar* bapak Kunarso juga memita izin terlebih dahulu kepada pemiliki kebun atau penebas. Penghasilan dalam sehari yang bisa didapat oleh bapak Kunarso kurang lebih mencapai 50 ribu rupiah.¹⁹

Latar belakang yang menyebabkan timbulnya praktek *nggancar* di Desa Gembong, dikarenakan mereka beranggapan bahwa sisa ketela tersebut tidak diambil atau tidak berguna bagi penebas, karena harga ketela yang biasa *digancar* jauh lebih murah dibandingkan dengan ketela yang normal. Salah

¹⁷ Hasil wawancara dengan Suratman selaku *penggancar* pada tanggal 25 Maret 2018.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Supar selaku *penggancar* pada tanggal 25 Maret 2018.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kunarso selaku *penggancar* pada tanggal 25 Maret 2018.

satu faktor pendorong melakukan *nggancar* adalah keadaan ekonomi, sehingga mereka menjadikan *nggancar* sebagai salah satu sumber pendapatan, walaupun harga hasil *nggancar* dibawah harga ketela pada umumnya, namun jika dikumpulkan sedikit demi sedikit maka setelah terkumpul bisa mendapatkan hasil yang lumayan, apalagi mereka yang *nggancar* tidak mengeluarkan modal untuk menebas atau menanam namun dengan ngancar mereka bisa ikut memanen.²⁰

Menurut bapak Harsono selaku tokoh masyarakat di Desa Gembong Jika dalam proses pengambilan sisa ketela (*nggancar*) tersebut masyarakat Desa Gembong melakukan tindakan yang bisa menyebabkan kerugian penebas maupun pemilik kebun, maka mereka tidak sah dalam pengambilan sisa ketela yang *digancar*. Oleh karena itu, proses kepemilikan harta menurut Islam tidak terpenuhi.²¹

Proses pencarian dan pengambilan sisa ketela (*nggancar*) ini dimulai dari faktor ekonomi masyarakat yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena, mayoritas masyarakat Desa Gembong kec. Gembong Kab. Pati bekerja sebagai petani dan orang-orang yang *nggancar* merupakan orang yang tidak mempunyai kebun.

²⁰ Hasil wawancara dengan pamuji selaku pemilik lahan pada tanggal 28 Maret 2018.

²¹ Hasil wawancara dengan Harsono selaku tokoh masyarakat pada tanggal 29 Maret 2018.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK NGGANCAR DI DESA GEMBONG KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

A. Analisis pelaksanaan *nggancar* di Desa Gembong Kecamatan Gembong kabupaten Pati

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan anantara yang satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa, seseorang hanya ahli dalam bidang tertentu saja, seperti seorang petani mampu menanam ketela pohon dengan baik, tetapi dia tidak mampu membuat cangkul. Jadi, petani mempunyai ketergantungan kepada seorang ahli pandai besi yang pandai membuat cangkul, juga sebaliknya, orang yang ahli dalam pandai besi tidak sempat menanam padi, padahal makanan pokoknya adalah beras, jadi seorang yang pandai besi memiliki ketergantungan kepada petani.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia tidak

melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain, timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia.¹

Praktek kepemilikan ketela dari hasil *nggancar* di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten pati ialah sebuah Kebiasaan masyarakat yang menjadi adat dalam suatu kelompok masyarakat, kebiasaan tersebut mereka lakukan setelah kebun ketela dipanen. Aktivitas *nggancar* merupakan salah satu mata pencaharian mereka. Hasil *nggancar* yang berupa ketela menjadi milik sepenuhnya bagi penggancar. Hasil *nggancar* tersebut dijual kepada pengepul ketela dengan separuh harga dari harga normal.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa praktek *nggancar* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Gembong dapat diaktegorikan menjadi dua, yaitu *nggancar* yang baik dan *nggancar* yang menyimpang. *Nggancar* yang baik sebagaimana dilakukan oleh bapak Supar dan bapak Kunarso. Mereka sebelum melakukan *nggancar* meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik kebun atau penebas, jika pemilik kebun membolehkan mereka *nggancar* maka bapak Supar dan bapak Kunarso baru mulai kegiatan *menggancar*. Mereka hanya *menggancar* sisa-sisa ketela setelah panen selesai

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 31.

dan mereka hanya mengambil ketela yang sudah tidak dimanfaatkan oleh penebas.

Beda halnya dengan yang dilakukan oleh bapak Anto dan bapak Suratman. Mereka *menggancar* tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemilik kebun atau penebas. Tanpa menunggu diperbolehkan atau tidaknya untuk *nggancar* mereka tetap akan memulai *nggancar*. selain itu mereka melakukan *nggancar* pada waktu proses pemanenan. Mereka terkadang mengambil ketela yang masih utuh, ketela tersebut sebenarnya masih dimanfaatkan oleh si penebas.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengelompokkan praktek *nggancar* menjadi dua: pertama *nggancar* yang baik, yaitu *nggancar* yang dilakukukan setelah panen, dilakukan setelah mendapatkan izin dari pemilik kebun maupun penebas, sesuai dengan yang dipaparkan oleh tokoh masyarakat sekitar bahwa masyarakat dalam melakukan *nggancar* tidak boleh menyebabkan ruginya penebas. Kedua *nggancar* yang menyimpang, yaitu *nggancar* yang dilakukan pada saat proses pemanen, dilakukan tanpa izin dari pemilik kebun maupun penebas, mengambil ketela yang masih dimanfaatkan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap praktek *nggancar* di Desa Gembong Kecamatan Gembong kabupaten Pati

Kepemilikan dalam Islam untuk memiliki harta, ternyata tidak semudah yang dipikirkan oleh manusia, harta dapat dimiliki oleh seseorang asal tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum adat. Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Islam memberikan batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar dalam setiap tindakannya tidak menimbulkan *kemadhorotan* baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain. Dengan demikian diharapkan setiap manusia dapat mengambil manfaat antara yang satu dengan yang lainnya dengan jalan yang lurus sesuai dengan norma-norma agaman tanpa kecurangan dan kebatilan. Dengan katalain, sesungguhnya Islam tidak melarang kepemilikan individu secara mutlak, namun juga tidak membebaskan dan membiarkanya tanpa batas. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisaa': 29)*²

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah menyuruh umat manusia untuk mencari penghasilan atau pendapatan dengan jalan perniagaan yang diridhoi oleh Allah SWT bukan dengan cara yang bathil. Allah menyuruh umat manusia dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka keharusaan adanya kerelaan kedua belah pihak (عن تراض منكم) „*an taraadhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang ada di lubuk hati, tetapi ciri-ciri dan tanda-tandanya dapat dilihat. *Ijab dan qobul, meminta Izin dan diizinkan*. Atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukan kerelaan atau keikhlasan. Sehingga tidak ada penipuan atau pemaksaan yang merugikan salah satu pihak.

Hasil *nggancar* yang berupa ketela dilihat dari sisi manfaat (nilai atau kegunaan) merupakan benda yang mempunyai kegunaan atau manfaat yang sepadan dengan harta. Misalnya dalam jual beli ketela tersebut dihargai sejumlah uang, dengan cara pemilik ketela mentransaksikan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PustakaAmani, 2005), hlm. 107.

dengan imbalan uang. Demikianlah sisi pandang pada penyebutan ketela sebagai harta yang bernilai. Dari segi statusnya, harta dibedakan menjadi tiga yaitu: *mal mamluk* (harta benda yang statusnya berapada dalam pemilikan seseorang), *mal mahjur* (benda yang tidak dapat dimiliki menurut syara'), *mal mubah* (segala harta selain yang termasuk kedua kategori diatas).³ Harta mubah ialah harta yang setiap orang bisa menguasai dan memiliki, orang yang lebih dulu menguasainya ia menjadi pemiliknya. Sisa ketela yang tertinggal di lahan yang telah selesai dipanen merupakan benda mubah, dan bebas untuk dimiliki karena pemilik lahan atau penebas sudah tidak memanfaatkan sisa-sisa ketela tersebut.

Ketela tersebut pada dasarnya merupakan benda berharga, oleh karena itu tidak bisa dimiliki secara sembarangan. Dalam segi kepemilikan, Islam telah mengatur tentang tata cara kepemilikan terhadap benda tertentu, yang tetunya besinggungan langsung kepada syarat dan rukun dalam kepemilikan. Ketela adalah termasuk harta, untuk mengetahui apakah *penggancar* berhak untuk memiliki ketela tersebut, terlebih dahulu harus diketahui sebab-sebab kepemilikan. Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu

³ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 26.

benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain: *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas) *Al-khalafiyyah* (penggantian) *Tawallud min Mamluk* (beranak pinak atau berkembang biak) *Al-,aqd* (ikatan)⁴

Keempat sebab kepemilikan diatas hanya *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas) yang sesuai untuk mendapatkan status kepemilikan atas ketela hasil *nggancar*. Benda tersebut belum dikuasai orang lain lebih dahulu. Sisa ketela yang belum diambil oleh orang lain boleh dimiliki seseorang. Sebagaimana yang terkandung dalam kaidah Fiqih, siapa pun orang yang mengambil barang mubah sebelum ada orang yang mengambil lebih dahulu maka ia berhak memilikinya. Dalam hal ini, ketela yang tertinggal didalam tanah dan dianggap sudah tidak berharga bagi si penebas bisa dikatakan sebagai harta bebas, jika sudah tidak diambil dan dimanfaatkan oleh si penebas. Orang yang *nggancar* dapat mengambil ketela tersebut untuk diambil manfaatnya baik untuk dijual maupun diolah sendiri.

Kaidah Fiqih membolehkan seseorang memiliki benda mubah, akan tetapi orang yang mengumpulkan barang atau benda tersebut harus memperhatikan beberapa syarat *ihrazul mubahat*. Supaya barang atau benda tersebut menjadi milik yang sah dalam pandangan Islam. Barang atau benda

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 38-40.

mubah tersebut akan menjadi milik seseorang yang sah jika orang tersebut mengambilnya dengan cara yang baik dan benar.

Kaidah fiqih menjelaskan bahwa, salah satu dari sebab kepemilikan atau *milkiyah* atau *tamalluk*, ialah: *ihraz al-mubahat*. Hal ini sesuai dengan definisi mubah berikut ini:

الْمَالُ الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكٍ مُحْتَرَمٍ وَلَا يُوجَدُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ مِنْ تَمْلِكِهِ

“Harta yang tidak masuk ke dalam milik yang di hormati (milik seseorang yang tidak sah) dan tak ada pula suatu penghalang yang dibenarkan oleh syara’ untuk memilikinya”.

Seseorang yang telah menguasai suatu barang dengan tujuan ingin memiliki, maka benda itu menjadi miliknya. Menguasai dengan maksud memiliki itulah disebut *ihraz*. Memiliki benda-benda mubah dengan jalan *ihraz*, memerlukan dua syarat: Pertama benda itu tidak dikuasai orang lain lebih dahulu. Umpamanya seseorang mengumpulkan air hujan dalam satu wadah dan dibiarkan, tidak diangkat ke tempat yang lain, maka orang lain tidak berhak lagi mengambil air dalam wadah itu, karena air ini tidak lagi merupakan benda mubah lantaran telah dikuasai oleh seseorang. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Abu dawud:

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 11.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ. (رواه أبو داود)

Artinya: *Dari Abu Huroiror R.A Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa menguasai sesuatu yang belum dikuasai oleh seorang muslim maka ia berhak memilikinya” (HR Abu Dawud).⁶*

Sisa-sisa ketela setelah kebun dipanen secara otomatis menjadi milik umum. Apabila sisa ketela yang ada dikebun tersebut belum ada yang mengambil atau menguasainya terlebih dahulu maka boleh dimiliki seseorang dengan cara *nggancar*.

Kedua Maksud tamalluk (untuk memiliki). Jikalau seseorang memperoleh sesuatu benda mubah, dengan tidak bermaksud memilikinya, tidaklah benda itu menjadi miliknya. Umpamanya seorang pemburu meletakkan jaring (penangkap) lalu terjeratlah seekor binatang buruan, maka jika ia meletakkan jaringnya sekedar mengeringkan jaring itu, tidaklah ia berhak memiliki binatang buruan yang terjerat oleh jaringnya. Orang lain masih boleh mengambil itulah dipandang muhriz, bukan pemilik barang.⁷ Jadi orang yang

⁶ Abdurrahman bin abu Bakar, *al-Jami'u agh-Shoghair*, Juz I, Bandung: al-Ma'arif, hlm. 173.

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 11.

menggancar bisa dikatakan sah dalam kepemilikan apabila dalam proses mengumpulkan ketela dari sisa panen dengan niatan untuk dimiliki.

Kedua sebab diatas yang menjelaskan proses kepemilikan dengan jalan *Ihraz* untuk mendapatkan status kepemilikan atas ketela hasil *nggancar* sudah terpenuhi. Kedua sebab tadi berupa: Ketela tersebut belum dikuasai orang lain lebih dahulu dan warga yang *nggancar* mengumpulkan dengan niat untuk memiliki, jadi ketela tersebut sudah masuk kedalam *milk at-tamm*.

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan diatas, maka dalam praktek pengambilan sisa ketela di Desa Gembong Kec. Gembong Kab. Pati tidak bertentangan dengan hukum Islam jika dilihat dari niatan para *penggancar* yaitu semata-mata untuk mencari nafkah sebagai penunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Yang terpenting, pemilik kebun atau penebas telah merelakan jika ada *penggancar* mengambil sisa ketela dari kebun yang telah selesai dipanennya.

Kesalah pahamanan dan keraguan yang terjadi dalam kepemilikan ketela tersebut dapat diantisipasi dengan cara meminta izin kepada pemilik terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan *ngancar*, Karena ketela yang berada disekitar tempat panen terkadang masih dimanfaatkan sendiri oleh pemilik kebun. Itu semua dilakukan untuk

menghindari ketidakjelasan dari barang yang dimiliki dari hasil *nggancar*.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka menurut penulis praktek kepemilikan ketela hasil *nggancar* yang ada di Desa Gembong terdapat beberapa hal yang harus digaris bawahi. Orang yang melakukan kegiatan *nggancar* harus paham terhadap syarat-syarat kepemilikan. Mereka tidak boleh sembarangan dalam mengambil ketela, karena pada saat mengumpulkan ketela ia hanya diperbolehkan mengambil sisa-sisa yang sudah tidak dimanfaatkan oleh pemilik tanah atau penebas dan juga harus memastikan apakah ketela tersebut benar-benar belum ada yang menguasai sebelum ia melakukan *nggancar*. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka kepemilikan secara penuh atas suatu barang telah terpenuhi dalam pandangan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori tentang milkiyah yang kemudian di dialaogkan dengan data yang ada yakni tentang praktek *nggancar* di Desa Gembong, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Praktek *nggancar* yang dilakukan oleh warga Desa gembong merupakan kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh warga Desa Gembong saat musim panen ketela. Praktek ini sudah berjalan bertahun-tahun, masyarakat biasa melakukan kegiatan *nggancar* walaupun mereka tidak tahu siapa pemilik lahan atau yang mempunyai hak milik teradap hasil panen tersebut. Kegiatan *nggancar* di desa Gembong dibagi menjadi dua *nggancar* yang baik dan *nggancar* yang menyimpang.
2. *Nggancar* menurut hukum Islam diperbolehkan, sebab ketela tersebut masuk kedalam kategori benda *Ihraz al-mubahat*, yaitu benda-benda yang boleh dimiliki. Ketela tersebut merupakan sisa-sisa yang sudah tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dan secara otomatis menjadi benda mubah, sisa tersebut juga belum dikuasai oleh orang lain dan *penggancar* mempunyai tujuan untuk

memiliki hasil *gancaran* tersebut jadi ketela tersebut sudah masuk kedalam *milk at-tamm*.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan arahan dan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Sebaiknya warga Desa Gembong melakukan kegiatan *nggancar* ketika proses panen telah benar-benar selesai, agar tidak terjadi penyimpangan dalam aktivitas *nggancar*.
2. Mereka meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik, supaya proses kepemilikan sesuai dengan ajaran syariat dan tidak merugikan bagi diri sendiri maupun pihak lain, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar sah dan dibenarkan menurut pandangan Islam.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT akhirnya penulis dapat menyampaikan laporan penelitian ini. Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini tetaplah menjadi keniscayaan atas diri

manusia. Penulis berharap setitik usaha berupa hasil penelitian ini dapat menjadikan pembelajaran berharga untuk memahami syariat Islam dan bermanfaat bagi penulis sendiri, petani, penebas, *penggancar*, orang-orang yang terkait dalam penelitian skripsi ini dan siapapun yang membaca hasil penelitian ini. Penulis sadar sepenuhnya akan segala kekurangan dalam berbagai hal baik kesalahan pemilihan kata, penyusunan redaksi kalimat atau yang lainnya . Untuk itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini ke depan guna perluasan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngasak*, Skripsi, Syariah, Semarang: Perpustakaan Syariah UIN Walisongo. 2015.
- Abdurrahman bin abu Bakar, *al-Jami'u agh-Shoghir*, Juz I, Bandung: al-Ma'arif.
- Albani Muhammad Syukri Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Anto Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003, cet. I.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Az-Zuhaili Wahbah (ed.), *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk dari "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu", Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid VI, Cet. I.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bisri, Cik Hasan, *Metode Penelitian Fiqh jilid I*. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PustakaAmani, 2005.
- Djuwain, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ermawati Tuti, *Studi Komparatif Konsep Kepemilikan Harta dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dan Islam*, Skripsi, Syariah, Semarang: Perpustakaan Syariah UIN Walisongo. 2004.

Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

http://eprints.uny.ac.id/2609/1/5.Tradisi_dan_Budaya_Masyarakat_Jawa_dalam_Perspektif_Islam. Akses 26 Oktober 2015

Husein al-Mujahid Thoha dan A. Atho'illah Fathoni Alkhalil, *Kamus Akbar Bahasa Arab*, Depok: Gema Insani, 2013.

Laporan Hasil Pengolahan Data profil Desa dan Perkembangan Desa Gembong 12 juli 2017.

M. Yazid Farihin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*. Skripsi, Syariah, Semarang: Perpustakaan Syariah UIN Walisongo. 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, jakarta: Prenada Media, Cet.Ke-3,2015.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Teungku, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Mujibatun Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Lembaga Sosial dan Agama, 2012.

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nur Chafidoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status kepemilikan Tanah SMK Muhammadiyah 1 Semarang*, Skripsi Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah UIN Walisongo, 2007.

Rahman Ghazali Abdul, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sahrani Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sanusi Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.

Sri Yanti, *Analisis Terhadap Status Kepemilikan Aset-Aset di Madrasah Aliyah AshShiddiqiyyah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon*, Skripsi Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah UIN Walisongo, 2006.

Sudarmanto, *Kamus lengkap Bahasa Jawa*, Semarang: Widya Karya, 2009.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Bandung: 2014..

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Suryabrata Suradi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-II, 1998.

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015, cet. 3.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Tasirul Wafa
Tempat, tanggal lahir : Pati, 8 Maret 1995
Agama : Islam
Alamat : Dk. Ngembes Rt 01 Rw 11 Ds. Gembong
Kec. Gembong Kab. Pati

Menerangkan dengan sesungguhnya

Riwayat pendidikan

A. Pendidikan formal

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum Gembong, Pati
Lulus Tahun 2007
2. Madrasah Tsanawiyah Negri (MTs.N) Gembong, Pati Lulus
Tahun 2010
3. Madrasah Aliyah (MA) Raudlatul Ulum Guyangan, Pati
Lulus Tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan
sebenarnya.

Hormat kami

Muammad Tasirul Wafa